**BAB II**

**KONDISI CINA DAN TAIWAN DALAM KONTEKS STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

1. **Sejarah Singkat Konflik Perlombaan Senjata Cina-Taiwan**

Cina dan Taiwan merupakan negara-negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap keamanan di kawasan Asia Timur.Membahas tentang hubungan Cina daratan dengan sangatlah menarik.Berdasarakan sejarahnya, konflik Cina-Taiwan bermula dan munculnya gerakan kaum nasionalis pada 1911 pimpinan Dr. Sun Yat sen (yang kemudian dianggap sebagai bapak Cina modern) dan berhasil menggulingkan Dinasti Manchu yang saat itu sedang berkuasa.Namun, yang diambil alih kekuasaannya oleh Sun Yat Sen ketika itu adalah pemerintahan boneka dan kekuasaan sesungguhnya berada di para jenderal sebagai pengisi kekosongan dan kekuasaan Dinasti Manchu yang lemah (Pikiran Rakyat, 15 April 2002).

Maka setelah Sun Yat Sen menggulingkan Dinasti Manchu, jenderal yang paling berkuasa marah besar. Yuan Shih-Kai, jenderal yang paling berkuasa pada saat itu, kembali menggulingkan Sun Yat Sen dan sekaligus membungkam Partai Kuomintang di Cina. Sun kemudian melarikan diri dan membangun partainya secara diam-diam. Pada tahun 1917, Uni Soviet membantu Partai Kuomintang dengan harapan Sun bisa menerima kehadiran Partai komunis di Cina.Hal ini dilakukan Uni Soviet karena Uni Soviet hidup menyendiri di eropa dengan ideology komunisnya, sementara negara-negara Eropa lainnya melakukan revolusi yang bergerak menuju ideologi kapitalis (Pikiran Rakyat, 15 April 2002).

Delapan tahun kemudian (1925), Sun Yat Sen meninggal dunia.Kepemimpinan Partai Kuomintang jatuh kepada tokoh baru, Chiang Kai Sek.Chiang kemudian berhasil mengambil alih kekuasaan dari para jenderal tadi dan melakukan penyerangan terhadap Partai Komunis. Padahal sebelumnya, saat mengambil alih kekuasaan dari para jenderal, Partai Kuomintang dibantu oleh Partai Komunis, tetapi rupanya Chiang Kai Shek tidak menghendaki adanya saingan kekuatan dalam sistem penguasaan tunggal yang diciptakannya (Pikiran Rakyat, 15 April 2002).

Di lain pihak, Uni Soviet mulai menghembuskan pengaruh-pengaruhnya karena mulai tidak akur dengan Partai Komunis di Cina. Akibatnya, Uni Soviet mengambil keputusan untuk membatasi pertumbuhan kepentingan Jepang di Cina karena hal tersebut lebih baik daripada mempengaruhi hasil perang saudara di Cina (Pikiran Rakyat, 15 April 2002).

Kondisi ini membuat dukungan rakyat terhadap Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek menjadi semakin pudar.Sebaliknya, Partai komunis yang dibangun kembali oleh Mao Tsetung sejak tahun 1928 semakin solid.Maka perang saudara yang terjadi pada 1945-1949 pasukan Mao Tsetung berhasil memukul mundur pasukan Partai Kuomintang (Pikiran Rakyat, 15 April 2002).

Setelah menderita kekalahan, Chiang dan sisa pasukannya lari ke Taiwan dan menundukkan rakyat pulau tersebut (Pulau Formosa) yang mencoba menantangnya.Di pulau kecil inilah Chiang menyusun kekuatan barn dan mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat (AS).Hingga kini mereka tinggal di pulau Taiwan dan membuat pemerintahan Taiwan.Namun Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya sehingga konflik pun belum selesai hingga kini (Pikiran Rakyat, 15 April 2002).

Lebih dari satu dekade Taiwan telah bergerak menjauh dari komitmen "One China Policy" dimana hal ini telah menimbulkan ketegangan antara Cina dan Taiwan yang berimplikasi pada identitas nasional masing-masing Negara.Pola interaksi ini berubah ketika pada awal 1990an, Taiwan memulai demokratisasi yang telah menjadi karakteristik identitas nasional mereka yang telah berbeda dari Mainland-nya, tetapi juga bukan asli Taiwanesse. Cina telah menggunakan ancaman militer kepada Taiwan pada tahun 1996 yang ternyata secara tidak langsung telah memperkuat identitas nasional Taiwan sekaligus memperlemah kebijakan "One China Policy" (ICG Asian Report No.53, What's Left of 'One' China, 2003:01).

Konflik ini telah menimbulkan peningkatan pertahanan dengan peningkatan kekuatan militer antara kedua negara dan secara umum juga terjadi pada negara¬negara di kawasan Asia Timur.Menurut Wheleer dan Booth, Security Dillema tercipta ketika peningkatan kekuatan militer yang besar terjadi pada suatu Negara yang menimbulkan kecemasan terhadap negara lain (Baylis dan Smith, 1997:117).

Hal ini mendorong adanya perlombaan senjata antara Cina dan Taiwan yang secara khusus mereka mengalokasikan dana yang besar pada program modernisasi dan pembangunan kekuatan militer mereka. Fakta-fakta yang menunjukkan perlombaan senjata antara Cina dan Taiwan adalah pada tahun 1999 Cina telah membangun system misil yang telah diarahkan pada Bandar udara pertahanan Taiwan, pusat komando bersenjata, dan fasilitas Angkatan Laut Taiwan (1999 Cross Straits Reports).

Sebagai tandingan, system pertahanan Taiwan juga turut diperkuat. System pertahanan udara Taiwan terbaru terdiri dari tiga set sistem Patriot yang melengkapi enam set rudal Tien-Kung I dan Tien-Kung II ( Sky Bow ). Theater Missile Defense (TMD) dari seri rudal Tien Kung ini dikembangkan untuk menandingi misil DF-3 milik Cina yang berjarak tempuh 3000 kilometer, misil DF-15 dan DF-21 ( dengan jarak tempuh 600 dan 800 km ). Ada alasan Militer dan Politis bagi Taiwan untuk berpartisipasi dalam sistem TMD yang ditawarkan oleh AS.Alasan utama adalah bahwa ancaman misil dari Cina adalah nyata dan terus bertambah. Cina telah menambah jumlah rudal jarak pendek DF-15 dan DF-11 untuk melawan Taiwan pada tahun 1990, dan total jumlah misil yang diproduksi terus bertambah dari 200 armada menjadi lebih dari 600 armada dalam beberapa tahun ke depan ([www.ciaonet.org](http://www.ciaonet.org)).

Misil-misil ini hanya membutuhkan waktu 6-8 menit untuk mencapai Taiwan melalui Selat Taiwan.Dalam hal ini Taiwan terus mengembangkan sistem pertahanannya yang lebih efektif untuk melakukan tindakan balasan setelah penyerangan pertama yang berguna tidak hanya sebagai pencegah serangan Cina namun juga untuk menjamin keadaan Psikologis dari rakyat Taiwan ([www.ciaonet.org](http://www.ciaonet.org)).

Jika dilihat dari hukum intemasional, secara de facto Taiwan memang memenuhi syarat sebagai negara.Sedangkan secara de jure, Taiwan belum bisa dianggap sebagai negara. Berdasarkan Konvensi Montivideo 1933, suatu negara akan memiliki Legal Criteria of Personality apabila memiliki: penduduk yang tetap, wilayah yang tetap, dan sebuah pemerintahan yang sah. Hal ini disebut sebagai pengakuan de facto bahwa Taiwan memang negara. Tetapi di sisi lain, negara-negara di dunia belum mengakuinya sebagai negara. Hal ini disebut sebagai pengakuan de jure.Pengakuan ini lah yang sedang diperjuangkan oleh Taiwan agar identitasnya sebagai negara dapat diakui.

1. **Kondisi Geografis Negara Republik Rakyat Cina**

Republik Rakyat Cina berdiri pada tanggal 1 Oktober 1949 setelah berhasil menumbangkan Partai Nasionalis sebagai oposisi Partai Komunis Cina.Dengan luas wilayah sebesar 9.596.960 km2, Cina merupakan salah satu negara dengan wilayah terbesar di dunia.Luas wilayah terbagi menjadi 9.326.410 km2 daratan dan 270.550 km2 lautan. Cina terletak di bagian Timur Asia, berbatasan dengan Laut Cina Timur, Teluk Korea, Laut Kuning, dan Laut Cina Selatan, berada di antara Korea Utara dan Vietnam. Batas negara Cina dengan negara sekitarnya dapat dijumlahkan sebesar 22.143.340 km2. Cina berbatasan dengan Afganistan sejauh 76 km, Bhutan 470 km, Burma 2.185 km, Hongkong 30 km, India 3.380 km, Kazakistan 1.533 km, Korea Utara 1.416 km, Krygyztan 858 km, Laos 432 km, Macau 0,34 km, Mongolia 4.673 km, Nepal 1.236 km, Pakistan 532 km, timur laut Rusia 3.605 km, barat laut Rusia 40 km, Tajikistan 414 km, Vietnam 1.281 km.

1. **Anggaran Militer Cina**

Anggaran militer Cina mulai mengalami peningkatan yang signifikan pada periode tahun 2000-an Peningkatan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 2.1

Anggaran Militer cina



Sumber: <http://www.golbalsecurity.org/military/world/china/budget-table.htm>

1. ***Military Deterrence* Cina**

Selat Taiwan merupakan satu dan dua tempat di Asia Pasifik dimana perang dimungkinkan terjadi, tempat lainnya adalah semenanjung Korea. Telah lebih dan 50 tahun, Republik Rakyat Cina (RRC) dan *Republic of China* (ROC, atau Taiwan) berkonflik dengan kekuatan militer sebagai instrumennya. Cina menganggap bahwa Taiwan merupakan bagian dan satu Cina dan berharap bahwa Taiwan suatu hari dapat bergabung lagi kepada *'Mainland'* Cina di bawah satu bendera nasionalis Cina.Tetapi di tahun 1990an, dengan demokratisasi yang dimulai dalam sistem pemerintahan Taiwan, Rakyat Taiwan semakin mendukung kemerdekaan Taiwan dan hal itu telah menjadi ancaman bagi Cina.Setelah konflik semakin memuncak dan tidak ada kesepakatan *(Cross-Strait Understanding),* maka stabilitas semakin tergantung pada *"military deterrence".*

Bagi Cina, alat penghindaran *(deterrence)* yaitu militer, merupakan cara untuk mencegah keputusan final Taiwan untuk memisahkan din untuk menjadi negara merdeka. Dan bagi Taiwan (dan juga Amerika Serikat), kekuatan militer merupakan alat untuk mencegah Cina menggunakan kekuatan bersenjatanya untuk memaksa Taiwan kembali kepada satu Cina.

1. **Persepsi Ancaman Yang Dihadapi Cina**

Ketika kekuatan militer diantara Cina dan Taiwan semakin meningkat secara signifikan di pertengahan tahun 1995, dan ada kekhawatiran Taiwan akan menjauh dari prinsip `Satu Cina', maka pemerintahan Beijing telah tertantang untuk mencari pendekatan barn untuk mengajak Taiwan bersatu sebelum Cina akhirnya melakukan serangan militer secara besar-besaran.

 Dilema yang dihadapi Cina adalah, jika invasi dilakukan kepada Taiwan maka secara rasional tujuan nasional paling penting dari Cina tidak akan terwujud. Dua tujuan nasional paling penting bagi Cina adalah Reunifikasi dan Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.Dengan kapabilitas misil balistik yang dimiliki Cina dan kapabilitas militer yang cukup besar, kesuksesan untuk menginvasi Taiwan masih kecil ditambah lagi dengan adanya kekuatan besar di belakang Taiwan yaitu Amerika Serikat.

 Di sisi lain, kekuatan militer Taiwan secara *de facto* semakin menguat dengan adanya Program Reformasi dan Modernisasi Pertahanan Taiwan yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dengan skala *hitherto.* Dengan belanja pertahanan Taiwan sebesar 1,9 Milyar US$ di tahun 2004, maka dimungkinkan posisi *bargaining* Taiwan semakin menguat dan posisi *bargaining* Cina akan semakin melemah. Dengan pendekatan *security dillema,* maka efek *domino* yang terjadi adalah mau tidak mau Cina juga turut mengembangkan teknologi persenjataan militernya dalam menghadapi Taiwan.Situasi yang terjadi adalah sebuah perlombaan senjata antara Cina dan Taiwan yang melibatkan kekuatan besar asing *(Interusive System)* di dalam kawasan Asia Timur.

1. **Strategi *"Non-Lethal Operations"***

Peningkatan militer Cina secara signifikan dimulai pada tahun 1995 dengan berfokus pada tekanan secara politik dan psikologis kepada Taiwan dan sekutunya.Cina telah menyiapkan sebuah `modulasi tekanan' dari tingkatan intensitas yang rendah dan *"non-lethal operations"* (contoh : latihan militer dan *"shows of forces").*Dalam *"non-lethal operations"* ini terdapat apa yang disebut sebagai `cara perang baru' yaitu *"pshycological warfare"* dan *"information warfare"*

1. **Phsycological Warfare**

Departemen-departemen utama dalam Komite Sentral Partai di Cina (seperti Departemen Propaganda, Departemen Internasional, Departemen Front Bersatu, dan Komisi Politik dan Undang-undang) telah mengalami beberapa kali restrukturisasi dalam organisasinya, tetapi pengalamannya dalam manipulasi politik memiliki peran yang sangat besar dalam kepemimpinan di Cina. Sebuah Komite dalam Politburo yang mengurusi masalah Taiwan secara langsung memiliki peran dalam hal manipulasi politik ini.Mereka didukung oleh *Departement of Taiwan Affairs* yang ada dalam partai dan dewan negara.Departemen ini juga berperan sebagai penasihat langkah strategi yang harus diambil oleh PLA khususnya tentang tekanan secara politik dan psikologis terhadap Taiwan.

 Dalam strateginya Cina berusaha memancing sentimen Taiwan dengan tujuan Taiwan kembali pada konsep *"One China Policy".*Sentimen yang digunakan oleh Cina adalah : pertama, yaitu ekonomi. Cina berusaha meyakinkan Taiwan bahwa ekonomi Taiwan tidak akan maju tanpa adanya kerjasama ekonomi yang dekat dengan Cina. Cina dengan mudah memberikan fasilitas dan akses kepada para ekonom yang kuat di Taiwan dengan harapan para ekonom ini akan membantu mendorong para pimpinan politik Taiwan untuk mendukung kembalinya Taiwan kepada *'Mainland'* Cina. Selain itu, Cina juga menggunakan apa yang disebut sebagai *"Cultural Appeal Weapons".* Dengan strategi ini Cina akan meyakinkan Taiwan bahwa Cina dan Taiwan merupakan satu bangsa dengan satu rumpun kebudayaan yang sama. Hal ini bertujuan untuk memperlunak pihak-pihak oposisi di Taiwan dan memperlemah dukungan publik pada kemerdekaan Taiwan. Terakhir, Cina menggunakan senjata ancaman, yaitu akan adanya invasi militer secara besar­besaran ke Taiwan bila Taiwan tetap menginginkan kemerdekaannya.

1. **Information Warfare**

Salah satu aplikasi militer yang ampuh yang dimiliki Cina dalam *"Phscylogical Waffare"* adalah *"Information Warfare".*Staff Jenderal Taiwan turut menaruh perhatian pada Kapasitas yang dmiliki Cina dalam hal ini. *"Information Warfare"* meliputi tidak hanya tentang perang psikologi, namun juga meliputi perusakan terhadap program komunikasi dan informasi yang dimiliki Taiwan, baik itu software maupun hardware (satelit, transmitters, dan lain lain). Berdasarkan dari berbagai sumber, PLA secara efektif dapat menyerang dan merusak *software* komunikasi dan informasi dan semua sistem kunci di Taiwan

 *Information Warfare* ini dapat dikatakan operasi gerilya yang sangat membantu Cina dalam menyiapkan strategi untuk melakukan invasi militer ke Taiwan. kemampuan PLA untuk menyadap segala informasi dan arus data dari sistem militer C4I Taiwan *(Command Control, Communication, Intelligence)* memiliki efek psikologis yang besar terhadap kemampuan pertahanan Taiwan. Ketidaktahuan Taiwan tentang kemampuan *Information Warfare* membuat Cina menjadikan *Information Warfare* sebagai sumber tekanan psikologis yang baru terhadap Taiwan.

1. **Kondisi Objektif Taiwan**

Taiwan adalah salah satu propinsi Cina yang memisahkan did dan pemerintah pusat Cina pada tahun 1949 setelah Partai Komunis Cina memproklamirkan beridirinya negara yang berdasarkan komunisme di daratan Cina. Perbedaan ideologi yang dianut oleh Partai Komunis Cina dan Partai Nasionalis Cina melatarbelakangi sikap partai untuk mengungsi ke pulau Taiwan.Luas wilayah Taiwan mencapai 35.980 km2 yang mencakup wilayah daratan seluas 32.260 km2 dan luas wilayah Taut seh~as 3.720 km'.

Wilayah pemerintahan Taiwan mencakup kepulauan Pescadores, Quemoy, Kepulauan Matsu, dan beberapa kepulauan kecil di laut Cina.Kemudian beberapa pulau di lepas pantai Taiwan seperti Pulau Hijau, Pulau Anggrek, dan pulau kecil di kawasan timur laut yang biasa disebut kepulauan Tiaoyutai (Kompas, Cina siap gempur Taiwan, 17 Februari 1999).

Berbeda dengan keadaan politik Taiwan yang selalu bergejolak baik karena kepentingan partai politik di Taiwan, juga karena pengaruh tekanan dan kepentingan RRC.Di sektor ekonomi Taiwan tumbuh dengan pesat, khususnya di bidang industry dan perdagangan selain sektor pertanian dan pariwisata.Saat ini, ekonomi Taiwan bergerak dibidang industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronika, komputer serta semikonduktor yang sudah diakui kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan dan transportasi. Sebelumnya, industri di Taiwan bergerak di bidang barang-barang domestik dan rumah tangga bahkan pada masa lalu, Taiwan dikenal sebagai penghasil barang-barang tiruan dari produk Jepang dengan kualitas di bawah kualitas produk made in Japan khususnya dikalangan pasar Indonesia, produk made in Taiwan berkonotasi produk tiruan dan produk Jepang.

Taiwan memiliki pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi yang cukup kuat di kawasan ini. Karena itu, bersama-sama dengan Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong, Taiwan dimasukkan dalam daftar negara-negara Industri Baru yang sudah menunjukkan ketangguhannya terutama dalam menghadapi krisis 1997.

1. **Persepsi Ancaman Yang Dihadapi Taiwan**

 Dengan semakin terbukanya demokratisasi di Taiwan, menjadikan Taiwan semakin mendapat dukungan publiknya (Native Taiwanesse) untuk lepas dari Cina dan mendapatkan kemerdekaannya.

 Tetapi di sisi lain, ekonomi Cina yang semakin menguat menimbulkan asumsi baru di Taiwan bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat di Cina berarti belanja dan modernisasi militer di Cina juga semakin kuat. Hal inilah yang menjadi ketakutan tersendiri bagi Taiwan karena posisi Taiwan untuk mendapatkan identitas nasionalnya sebagai negara merdeka akan semakin lemah.

 Ditambah lagi adanya peralihan sistem pemerintahan dari komunis ke demokrasi membuat struktur pemerintahan baru di Taiwan Amerika Serikat dan Taiwan untuk bersekutu demi menjaga kepentingan masing-masing di kawasan Asia Timur yang dibutuhkan Taiwan dalam memodemisasi militernya adalah sistem pertahanan yang komprehensif untuk menangkal serangan militer dari Cina dan serangan balasan yang cukup efektif ke titik-titik pangkalan militer di Cina masih labil. Dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri Taiwan tidak akanmampu mengadakan reformasi dan modernisasi militernya untuk bertahan dari invasi militer Cina.

 Akhirnya, dengan adanya pihak ketiga yaitu Amerika Serikat, Taiwan mendapatkan induk semang untuk membantunya dalam memodernisasi militemya secara besar-besaran. Simbiosis mutualisme ini lah yang menjadi dasar bagi

1. **Strategi Militer Taiwan Dalam Perlombaan Senjata**

 Dengan adanya situasi politik yang masih labil di Taiwan yaitu dari sistem komunis ke demokrasi, maka yang menjadi pusat perhatian Taiwan saat ini adalah modernisasi struktur militer dan reformasi hubungan sipil-militer.Sedangkan dari segi pertahanan, Taiwan mendapat dukungan militer penuh dari Amerika Serikat. Dengan adanya modernisasi militer ini, diharapkan bahwa ketika Taiwan masih dalam proses pematangan secara politik, Taiwan juga mampu untuk bertahan dari invasi militer Cina. Kapabilitas misil balistik yang dimiliki Taiwan diperkirakan mampu untuk menahan serangan militer dari udara dan laut.

 Reformasi pertahanan militer Taiwan difokuskan pada empat hal yaitu :

1. Hubungan sipil-militer
2. Modernisasi militer
3. Peningkatan keamanan nasional dan strategi militer
4. Alih teknologi senjata militer (Carnegie Papers NO.46, Dettering Conflict In The Taiwan Strait : The Successes and Failures of Taiwan's Defense Reform and Modernization Program, July 2004).

 Pemerintahan Taiwan dengan bantuan dari Amerika serikat akan mencoba untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di empat isu di atas untuk membangun sistem militer yang lebih profesional, capable, dan transparan yang akan lebih responsif terhadap pemerintahan Taiwan yang demokratis dan mampu untuk mengadakan serangan dan bertahan jika ada invasi militer Cina.

1. **Restrukturisasi Dan Modernisasi Angkatan Bersenjata Taiwan**

 Para pemimpin politik dan militer Taiwan menganjurkan bahwa dalam angkatan bersenjata Taiwan diperlukan suatu restrukturisasi dan modernisasi khususnya untuk menanggapi persepsi ancaman terhadap Taiwan dalam beberapa dekade belakangan ini. Saat ini, Taiwan menghadapi ancaman yang lebih kompleks dan Cina dikarenakan PLA telah meningkatkan jumlah misil balistik jarak pendek (SRBM/Short-Range Ballistic Missile), pesawat tempur canggih, kapal selam modern dan kapal perang, peningkatan kapabilitas amphibi penyerang, intelijen dan penyadapan informasi.

 Prioritas pertama dalam reformasi struktur organisasi militer Taiwan adalah mengurangi jumlah personil tentara operasional di lapangan dari jumlah minimum 370.000 personil menjadi jumlah maksimal 325.000 personil saja.Pengurangan ini juga sebagai bagian dan konsolidasi program militer dengan kode Jing Jin.Pengurangan ini diharapkan tercapai dalam tiga periode dengan tiap periodenya berkurang sejumlah 15.000 personil per tahun antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. selain pengurangan personil, hal yang ditekankan dalam program Jing Jin adalah penyederhanaan rantai komando, konsolidasi institusi pendidikan militer, dan pengurangan jumlah jenderal di lapangan khususnya di angkatan darat (Carnegie Papers NO.46, *Dettering Conflict In The Taiwan Strait : The Successes and Failures of Taiwan's Defense Reform and Modernization Program*, July 2004).

 Restrukturisasi angkatan bersenjata Taiwan juga membutuhkan kekuatan yang lebih besar dalam hal kendaraan perang dan senjata modern, seperti kendaraan perang di darat, pesawat tempur dan kapal perang, kendaraan anti kapal selam (ASW/Anti-Submarine Warfare), kapabilitas misil balistik, operasi bersama, peringatan awal (EW/Early Warning), pengintaian dan sistem manajamen pertempuran atau C4ISR (Command and control, communication, computers, intelligence, surveilance, and reconnaisance).

 Dengan bantuan Amerika Serikat, Taiwan telah menunjukkan kesuksesan dalam restrukturisasi dan modernisasi angkatan bersenjatanya.Amerika Serikat secara bertahap meningkatkan penjualan senjata, konsultasi militer, dan bantuan langsung terhadap Taiwan. Di bulan April 2001 saja, Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata secara besar-besaran seprti Radar Peringatan Awal (EW/Early Warning), pesawat pengintai, kapal perang, kapal selam perang, beserta penyediaan bantuan teknis terhadap militer Taiwan.

 Sebagai tambahan, Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah melakukan studi dan penelitian terhadap kapabilitas militer Taiwan selama tiga tahun ke belakang, termasuk studi mendalam terhadap kemampuan Taiwan dalam bertahan dari serangan udara, blokade laut, dan serangan darat. Amerika Serikat juga membantu Taiwan dalam melakukan survey dalam pembangunan sipil dan militer. Lebih lanjut, Amerika Serikat telah mengirimkan representatif dalam setiap latihan militer Taiwan sebagai bagian dari operasi bersama dan koordinasi dalam evakuasi `non-combatants' jika terjadi krisis dalam perang.

 Sebagai hasilnya, angkatan bersenjata Taiwan meningkat secara kualitas dalam beberapa tahun.Angkatan bersenjata Taiwan secara strategis mampu untuk bertahan secara aktif dan pasif terhadap serangan udara dan misil balistik Cina.

1. **Pembangunan Keamanan Nasional Dan Perencanaan Strategis**

 Secara Keseluruhan Proses pembangunan kemanan nasional dan perencanaan strategis secara keseluruhan bagi Taiwan lebih penting daripada pembangunan sistem persenjataan, rekapitulasi struktur militer, dan koordinasi operasi militer. Tanpa adanya sistem perencanaan strategis yang komprehensif dan pembangunan keamanan nasional, maka akan sangat sulit untuk menentukan prioritas strategis, operasi militer, doktrin operasional, dan struktur kekuatan militer khususnya yang berhubungan dengan perlindungan aset-aset militer dan kepentingan nasional.

 Untuk menghadapi invasi militer dan Cina, Taiwan harus mengembangkan suatu strategi militer yang cukup efisien dalam menggunakan sumber daya militer yang terbatas, strategi yang efisien dalam integrasi peringatan awal (EW/Early Warning), respon militer yang cepat dan tanggap dalam pengaplikasian operasi militer lepas pantai sebagai garis pertahanan utama.

 Taiwan secara langsung telah meminta bantuan dari Amerika Serikat dalam pembangunan kemanan nasional dan perencanaan strategis ini. Taiwan terns mencari cara untuk memperkuat pertahanan dan kemanan nasional, perencanaan strategis dalam hal diplomasi, meningkatkan koordinasi di Dewan Kemanan Nasional, dan memperkuat hubungan antara Dewan Kemanan Nasional Taiwan dengan militer Taiwan yang berperan sebagai pelindung aset sipil dan militer Taiwan. Untuk mencapai tujnan ini, sebuah Badan Perencanaan Strategis dan Badan Pusat Integrasi di bentuk dalam Departemen Pertahanan Nasional yang mengikuti model yang sama dengan apa yang terdapat pada Departemen Pertahanan Nasional Amerika Serikat

 Badan Perencanaan Strategis bertugas sebagai pengawas implementasi seluruh proses reformasi pertahanan Taiwan. selain itu, badan ini juga bertugas dalam mengembangkan perencanaan strategis yang cukup komprehensif, menganalisis kebijakan kemanan Taiwan khususnya kebijakan jangka pendek (satu hingga lima tahun ke depan), dan meningkatkan kerja sama kemanan dan latihan militer dengan negara lain.

 Sedangkan Badan Pusat Integrasi bertanggung jawab untuk menganalisis ancaman yang datang baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang (sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan), mengembangkan dan menganalisis tipe-tipe skenario militer yang harus segera diambil yang kemudian akan diterapkan dalam perencanaan strategis, struktur pertahanan, kapabilitas militer, dan alokasi sumber daya nasional yang ada.

 Membangun kepemimpinan dan meningkatkan produksi senjata dan variasinya.Salah satu aspek krusial dalam reformasi pertahanan Taiwan adalah meningkatkan efisiensi dan integritas kepemimpinan meningkatkan produksi senjata dan variasinya.Selama beberapa tahun, kepercayaan publik pada militer Taiwan menurun karena tingginya korupsi belanja militer negara dalam kepemimpinan militer Taiwan. Oleh karena itu, pemerintahan Taiwan membutuhkan suatu kepemimpinan militer yang objektif dan transparan, sehingga produksi diversifikasi persenjataan akan menjadi lebih jelas.

 Salah satu manfaat restrukturisasi Departemen Pertahanan Nasional adalah untuk membentuk departemen yang profesional dengan satu keputusan tunggal di bawah wakil menteri persenjataan sebagai kepala biro persenjataan, sehingga tingkat korupsi atas pembelian senjata akan semakin rendah. Biro persenjataan ini bertugas mengembangkan strategi dalam penyediaan senjata taktis dan pengembangan teknologi persenjataan (Carnegie Papers NO.46, *Dettering Conflict In The Taiwan Strait : The Successes and Failures of Taiwan's Defense Reform and Modernization Program*, July 2004) .

1. **Anggaran Militer Taiwan**

 Sebagai tandingan militer Cina dalam konflik perlombaan senjatanya, anggaran militer Taiwan sejak periode tahun 2001/2002 hingga periode tahun 2003/2004 juga terus mengalami peningkatan sama seperti yang terjadi pada Cina. Peningkatan ini dapat dilihat pada tabel 2.2 gambar di bawah ini :

**Tabel 2.2**

**Jumlah Anggaran Militer Taiwan**

Sumber: <http://www.globalsecurity.org/military/world/taiwan/budget.htm>

1. **Cina dan Taiwan Dalam Kajian Politik Internasional**

Kajian politik internasional tidak membahas jenis hubungan atau fenomena (gejala) tersebut, kecuali jika hubungan tersebut dipergunakan untuk mengkaji tujuan negara atau dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan militer (Holsti, 1992:27).Perlu dibedakan pengertian antara hubungan internasional dengan politik intemasional.Ruang lingkup hubungan internasional meliputi seluruh tipe hubungan interaksi antar negara, termasuk asosiasi dan organisasi non negara (ekonomi, pariwisata, perdagangan dan lain-lain).Sedangkan ruang lingkup politik internasional terbatas hanya pada `permainan kekuasaan' yang melibatkan negara-negara berdaulat (Rudy, 1993:74). Jadi dalam hubungan internasional terdapat aktor-aktor : negara (state actor), dan bukan negara (non state actor), sedangkan dalam politik intemasional pelakunya hanyalah negara.

Dalam penelitian ini, kebijakan Cina dan Taiwan di bidang kemanan selama masa peningkatan kapabilitas milter serta pengaruhnya terhadap stabilitas kemanan di kawasan Asia Timur akan dikaji melalui kajian politik internasional, karena hubungan dan kondisi ini dikaji sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan militer, serta pelaku dalam permasalahan ini adalah negara.

Politik intemasional diartikan sebagai hubungan antara negara-negara merdeka, berdaulat, yang dicirikan dengan konflik, kompetisi, kerjasama, dan akomodasi. Fokus yang diperhatikan dalam politik intemasional adalah masalah distribusi kekuatan intemasional; situasi yang menyumbang perimbangan antar negara yang berkompetisi terhadap pecahnya perimbangan kekuatan, dan terhadap ciri-ciri proses komunikasi antar negara di seluruh dunia; kepentingan-kepentingan yang terwakili oleh aliansi antar negara; pola-pola konflik dan kerjasama antara negara-negara non-blok dan negara barat; hubungan yang didasarkan pada perdagangan ekonomi dan saling ketergantungan, usaha-usaha terhadap lembaga-lembaga yang memberikan kesempatan perdamaian dan kerjasama intemasional (Krisna, 1993:15).

Pada umumnya objek yang dikaji dalam politik internasional merupakan kajian serupa pada politik luar negeri.Keduanya menitik beratkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan, serta unsur power negara besar. Peneliti yang menganalisis tindakan negara terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan, pada dasarnya berkaitan erat dengan kajian politik luar negeri, sedangkan peneliti yang memandang tindakan demikian sebagai salah satu aspek pola tindakan suatu negara serta reaksi atau sambutan (respons) oleh negara lain, berkaitan erat dengan kajian politik internasional (Holsti, 1992:26).

Dalam pola itu jika kita amati hubungan internasional antar negara, kita akan melihat pokok hubungan itu dapat bersifat kooperatif dan dapat pula bersifat kompetitif. Hubungan antar negara bersifat kooperatif jika dua negara atau lebih berusaha bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama baik tingkat regional maupun global.Sedangkan hubungan kompetitif dapat muncul bila dua negara atau lebih saling bersaing dalam mencapai suatu kepentingan tertentu, dan konflik muncul apabila kepentingan-kepentingan tersebut saling berbenturan.

1. **Hubungan Antara Politik Luar Negeri Dengan Kebijakan Keamanan**

TB Millar menyatakan bahwa politik luar negeri merupakan kesatuan dan seluruh kebijakan yang mempengaruhi hubungan pemerintah dari suatu negara dengan pemerintah negara lain (Rosenau, 1969:57).Sedangkan kebijakan, menurut Dahlan Nasution merupakan arah tindakan yang direncanalsan untuk mencapai sasaran (Nasution, 1991:9). Menurut Millar, banyak tindakan negara yang bisa mempengaruhi hubungan luar negeri. Sedangkan kebijakan pertahanan menjadi politik luar negeri ketika mulai dioperasikan melintasi batas negara atau kelemahannya menyebabkan kevakuman yang menunggu untuk 'cliisi' oleh pihak luar (Rosenau, 1969:58).

Michael Brecher memilah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh politik luar negeri ke dalam empat pokok bahasan : (1) ekonomi pembangunan, (2) militer-keamanan, (3) politik-diplomatik, dan (4) budaya-status (Sukma, 1995:9-10). Dengan demikian, maka kebijakan keamanan dapat dianggap sebagai bagian dari politik luar negeri suatu negara, yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi politik nasional dan internasional yang dapat dianggap melindungi tujuan-tujuan mendasar sebuah negara.

Kebijakan keamanan memiliki tiga dimensi, yakni kebijakan ekonomi, kebijakan militer, dan kebijakan diplomatik. Dimensi kebijakan ekonomi memusatkan perhatian pada alokasi sumber daya di dalam masyarakat dan menangani hubungan-hubungan ekonomi dengan negara lain. Dimensi kebijakan militer terdiri dari kebijakan yang secara langsung berkenaan dengan angkatan bersenjata danpengguna kekuatan militer.Sedangkan dimensi kebijakan diplomatik memperhatikan soal-soal pengelolaan hubungan diplomatik antar negara. Kebijakan keamanan suatu negara akan dipengaruhi oleh doktrin strategis, yakni seperangkat operatif (operative beliefs), nilai, dan penilaian yang secara signifikan mengarahkan perilaku para pelaksana kebijakan dalam hal penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis (Ermath dalam Rizal Sukma, 1995:11).

Menurut Ermath, kebijakan militer memiliki dua unsur utama yaitu strategi militer dan struktur kekuatan.Strategi militer diartikan sebagai rancangan penggunaan kekuatan militer. Bersama-sama dengan prinsip-prinsip bersifat doktrin yang menjadi cara-cara penggunaan kekuatan militer, strategi militer akan menentukan misi (tujuan) dan tugas angkatan bersenjata. Sementara struktur kekuatan mengacu pada organisasi, tentara, dan peralatan dalam angkatan bersenjata serta kapabilitas yang dimiliki unuk menjalankan strategi militer. Kedua komponen ini akan akan berinteraksi dan melahirkan apa yang disebut postur keamanan nasional, yakni kemampuan sebuah negara untuk menanggulangi ancaman terhadap kemanan nasional.

Keseluruhan proses tidak bersifat statis melainkan sangat dinamis. Di satu sisi, evaluasi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan, terutama mengenai apakah postur keamanan nasional yang ada sudah mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, pada gilirannya akan membawa perubahan atau penyesuaian di dalam politik luar negeri, kebijakan keamanan, strategi militer, dan struktur kekuatan, untuk memperkuat postur keamanan nasional. Di pihak lain, perubahan-perubahan internal dan internasional akan membawa perubahan pada gambaran dunia, definisi situasi dan pada gilirannya akan mempengaruhi pula politik luar negeri suatu negara (Sukma, 1995:112).

1. **Studi Strategis**

Strategi adalah seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan (May Rudy, 2002:1).

Merumuskan suatu strategi berarti memperhitungkan semua situasi yang mungkin dihadapi pada setiap waktu di masa depan dan kemudian dari semenjak sekarang sudah menetapkan atau menyiapkan tindakan mana yang akan diambil atau dipilih kelak, guna menghadapi realisasi dari setiap kemungkinan tersebut.

Studi strategis pada dasarnya adalah mempelajari bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup (how to survive) menyangkut isu-isu keamanan nasional, regional, dan internasional.Jadi bukan hanya masalah pertahanan atau strategi di dalam pertempuran saja. Tujuan mempelajari studi strategis adalah untuk mempelajari kekuatan lawan (khususnya kemiliteran negara lain) dan untuk selanjutnya menilai kelebihan dan kekurangan lawan akan bermanfaat dalam berhubungan dengan negara tersebut (May Rudy, 2002:2).

Strategi dalam studi strategis lebih spesifik didefinisikan sebagai seni dalam mendistribusikan dan menggunakan cara militer untuk menghasilkan tujuan-tujuan politik, atau suatu eksploitasi kekuatan militer sehingga dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan, atau juga bisa dikatakan sebagai keterhubungan antara kekuatan militer dengan tujuan militer. Dan definisi ini, jelas bahwa esensi dari strategi adalah mengenai kekuatan (kapabilitas) atau ancaman kekuatan (Buzan, 1991:4).

1. **Konsep Kapabilitas**

Definisi luas dari kapabilitas adalah kemampuan negara untuk mengadakan perubahan dalam lingkungan internasional bagi kepentingan dirinya.Negara melakukan usaha-usaha efektif dalam dunia nyata dengan kapabilitasnya.

Hal-hal yang termasuk kapabilitas adalah usaha mempengaruhi dan memaksa. Aspek kapabilitas pengaruh berarti bahwa negara harus mampu memperoleh konsensus secukupnya melalui cara persuasi atau harmonisasi tanpa mempergunakan kekuatan atau kekuasaan. Tetapi apabila kesepakatan yang ingin dicapai terjadi pada masa konflik dengan negara lain, maka dimensi lain kapabilitas yang diperlukan adalah paksaan, yang merupakan perjuangan kekuatan untuk memaksa negara lain agar mengikuti kehendaknya. Jenis paksaan ini bisa berbentuk ancaman dan tekanan sampai kepada kekuatan fisik (Nasution, 1989:25-26).

Menurut Dahlan Nasution dalam bukunya Politik Internasional : Konsep dan Teori, tahun 1989, bahwa dalam garis besarnya unsur-unsur kapabilitas di bagi dalam dua kategori. Unsur yang nampak ada lima, yaitu :

1. Posisi geografik
2. Kependudukan dan tenaga kerja
3. Kekayaan
4. Kemampuan produksi industri dan pertanian
5. Kekuatan militer

Sedangkan unsur-unsur yang tidak tampak ada empat, yaitu :

1. Struktur politik, ekonomi, dan sosial.
2. Tingkat pendidikan dan teknik.
3. Semangat kebangsaan.
4. Posisi strategik internasional

Faktor atau unsur kapabilitas yang paling nyata dan paling relatif adalah kekuatan militer yang ada.Analisis dan penilaian berbagai variabel dalam kapabilitas militer telah menjadi amat penting bagi semua negara. Adapun yang menjadi pengukuran kapabilitas militer suatu negara dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Seberapa besar jumlah personil militer
2. Kemampuan dan jumlah peralatan serta persenjataan yang ditinjau dari segi modernisasi dan kemampuan memproduksi lebih banyak lagi.
3. Penyebaran manusia serta peralatan dari berbagai dinas militer dan pola penempatannya di dalam maupun di luar negeri.
4. Doktrin strategis dan taktis

Masalah yang timbul ialah interpretasi negara mengenai posisinya di dunia. Bilamana negara merasa posisinya terancam, maka is akan lebih mementingkan aspek pertahanan negaranya, yang berarti mengurangi perhatian pada kapabilitas lainnya. Bilamana negara merasa posisinya aman, maka perhatiannya akan beralih pada faktor-faktor kapabilitas lainnya (Nasution, 1989:28-31).

Adanya persepsi ancaman akan membuat setiap negara berupaya untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya guna memperkuat domestik dan posisinya di Internasional. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan memberikan akses pada dimensi lain. Kemajuan ekonomi akan memunculkan peran pertahanan¬keamanan yang berfungsi sebagai power untuk menjaganya dari segala bentuk ancaman dari luar dan dari dalam, sehingga konsentrasi peningkatan kapabilitas kekuatan militer mulai dipilih sebagai kebijakan utama untuk menyangga kepentingan ekonomi dan stabilitas politik luar negeri.

Dalam era nuklir, kekuatan militer tidak hanya menjadi instrumen untuk menghancurkan musuh, tetapi juga untuk meningkatkan kredibilitas kegiatan diplomasi yang diselenggarakan, misalnya dengan melakukan manuver-manuver militer di perbatasan, penempatan unit-unit militer di daerah `berbahaya' serta penggelaran kekuatan militer dengan cara mencolok (Holsti, 1992:388-389). Dengan semakin superior-nya kekuatan militer yang dimiliki suatu negara, maka semakin besar pula kapasitas negara tersebut untuk mempertahankan nilai-nilai dan kepentingannya di lingkungan intemasional, dan selain menitikberatkan pada fungsinya sebagai kekuatan koersif.Kekuatan militer juga dapat meningkatkan status negara tersebut sehingga lebih disegani kawan dan lawan (sebagai kekuatan penangkal).